BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan, seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu merugikan masyarakat.¹

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Kejahatan terjadi dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kejahatan.² Tindak pidana pencurian sekarang sudah tidak

¹ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm, 3

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2012, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta E. 1. Cet. 12. hlm 153.

terbatas kepada kalangan dewasa saja, tapi juga sudah diperankan oleh anak di bawah umur. Keterlibatan mereka merupakan multidimensi kerusakan sosial karena kurangnya pendukung dari berbagai pihak. Dalam hal ini orang tua cukup berperan penting sebagai *controller* sekaligus pemegang kendali yang cukup relevan.

Dalam lingkungan keluarga mereka tidak bisa di pandang sebelah mata karena posisi mereka sebagai tanggungan dan yang diperintah. Karena mereka akan cenderung berpikir penuh dengan penasaran terhadap hal-hal yang baru dan dianggap aneh dan perlu diketahui. Disitu mereka akan merekam sekeliling pada mulanya dan akan lebih jauh sesuai dengan waktu berjalan. Pada saat inilah anak-anak banyak merekam kejadian buruk karena lingkungannya yang buruk itu. Anak sering merasa diliputi dengan semua kemauan orang yang berada disekitarnya. Sehingga mereka bisa merekam kejadian-kejadian seperti pencurian, dan kejahatan lainnya. Sehingga mereka pada kemudiannya bukan lagi berperan sebagai perekam, akan tetapi sebagai pelaku utama. Seorang anak menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya. Manakala di masyarakat itu telah terjadi kemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, maka seorang anak bisa mengakibatkan berperilaku menyimpang. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang tidak terlepas dari masyarakat.³

Kenakalan anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan

³ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Cet 2, hlm. 61

ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman bagi kelangsungan ketertiban sosial.⁴ Setiap orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana maka dapat dipidana menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali anak. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dipertanggungjawaban.

Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur diatas maka dapat dipidana sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Perekonomian yang sulit mendorong seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan keinginannya, salah satu dengan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari yang punya atau dapat disebut mencuri. Tindak Pidana Pencurian telah diatur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Selain dari Pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian juga diatur dalam Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Maksud dari pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Salah satu yang dimaksud dari keadaan tertentu adalah sebagai berikut :

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, *Op Cit.* Hlm. 61

1. Barang yang dicuri adalah hewan.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁵

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun. Selain untuk memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, apabila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta apabila pencurian dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang

⁵ Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan baik penjara, kurungan dan atau denda.⁶

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku, yang tentu saja ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dan anak dalam hal sedang berhadapan dengan hukum. Hal ini merupakan upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) Tentang Sistem Peradilan Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana. Sanksi pidana yang dapat dijatuhi terhadap anak telah diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan;

⁶S.Wahyuni Tersedia di [View of TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK](#) di akses pada Tanggal 12 Mei 2025 Pukul 22.44 Wib

⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

- b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara⁸

Adapun tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat Tindak Pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.⁹

Dari beberapa macam bentuk pidana dan tindakan di atas jelas bahwa hakim itu tidak bisa memberikan langsung pidana penjara terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak, sebab berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi pidana penjara bagi

⁸ Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁹ Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

anak dibawah 18 (delapan belas) tahun merupakan jalan terakhir dalam proses hukum. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diharapkan akan mengurangi penjatuhan pidana terhadap anak dan sebaiknya dapat mengurangi anak melakukan tindak pidana terutama dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian masyarakat yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi ataupun keluarga dari anak yang bersangkutan.

Dengan adanya hasil laporan itu, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut diatas ditemukan adanya kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dengan inisial DS di kota Padang. Anak DS lahir pada tanggal 18 Mei 2005 dan berumur 16 Tahun. Anak DS bersama dengan saksi FDK (tuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 00.15 (Minggu dini hari) mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

¹⁰ Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 38.

secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pencurian oleh Anak DS dan FDK dilakukan dengan mendatangi rumah korban atas nama RPT. Ketika Anak DS dan FDK sampai dirumah korban RPT duduk duduk sambil melihat kondisi rumah disekitar rumah korban RPT, karena hari sudah larut malam dan situasi sudah aman kemudian anak DS dan FDK bersama sama masuk ke rumah korban RPT dengan cara memanjat dinding rumah korban dengan memegang tiang besi sehingga Anak DS dan FDK sampai dilantai atas dua tidak jauh dari atap rumah korban saat itu. Kemudian berjalan sampai ke sebuah pintu yang ada di lantai dua rumah korban dan langsung turun ke lantai satu melalui tangga yang ada di dalam rumah korban, lalu masuk ke kamar korban namun tidak mendapatkan barang barang berharga yang bisa diambilnya hanya melihat korban tidur saat itu. Kemudian Anak DS dan FDK berjalan ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sharp warna hitam diatas meja, saat itu anak DS langsung mengambil 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sharp warna hitam tersebut dan membawanya keluar rumah melalui pintu dapur rumah korban dan meletakkkan di luar, setelah itu Anak DS kembali masuk ke dalam rumah korban melalui pintu dapur tadi dan kembali mengambil 1 (satu) buah tabung Gas berat 3 kg yang berada di dapur rumah korban saat itu sementara FDK mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk Sekai yang terletak di ruang tamu dekat TV yang telah Anak DS ambil, setelah berhasil mengambil barang barang milik korban tersebut, kemudian membawanya pulang ke rumah FDK.

Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB Anak DS pergi dari rumah FDK dengan membawa 1 (satu) unit TV 32 Inch merk Sharp warna hitam sedangkan 1 (Satu) buah Kipas angin merk Sekai diambil dan dipakai FDK dirumahnya, kemudian terhadap 1 (satu) buah tabung gas berat 3 kg milik korban tersebut telah dijual oleh Anak DS dan FDK secara bersama sama kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Rimbo Datar Kec. Lubuk Kilangan seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil jualan 1 (satu) buah tabung gas berat 3 kg tersebut dibagi masing-masing Anak DS dan FDK yang mendapatkan bagian sebanyak Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), atas kejadian tersebut kemudian korban melaporkan ke Polsek Pauh untuk diproses hukum selanjutnya. Atas perbuatan Anak DS bersama sama dengan FDK, korban RPT mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Anak DS ditangkap pada tanggal 11 Maret 2022 dan ditahan di dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan 28 Maret 2022. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Padang menahan sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022. Masa tahanan diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan 22 April 2022. Telah menjatuhkan

putusan terhadap terdakwa anak atas nama DS pada kasus pencurian dengan pemberatan yang dituangkan dalam putusan nomor 8/Pid.sus-Anak/2022/PNpdg.¹¹

Berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan anak DS terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdakwa anak DS melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama dengan saksi FDK (tuntutan terpisah) dengan barang curian/barang bukti berupa 1 (satu) buah TV merk Sharp ukuran 32 inch warna Hitam. Hakim mempertimbangkan berdasarkan pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum dan saksi saksi yang diajukan serta berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan. Hakim mempertimbangkan dari unsur Barang Siapa, unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Berdasarkan Fakta tersebut,

¹¹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 8/Pid.sus-Anak/PN Pdg/2022, 12-04-2022, *Pencurian Dengan Pemberatan, Dengan Terdakwa: Nama Samaran*, <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecf7493235d1e2a0cd303831373038.html>>

menimbulkan keyakinan hakim dengan : menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah TV merk Sharp ukuran 32 inch warna Hitam, Dipergunakan dalam perkara lain An. FDP (Penuntutan terpisah). Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; Keadaan yang memberatkan : perbuatan anak merugikan saksi korban. Keadaan yang meringankan : anak belum pernah dihukum, anak berlaku sopan di persidangan, anak mengakui perbuatannya dan mempermudah jalannya pemeriksaan di persidangan. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan anak DS terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DS dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi tahanan yang telah dijalani anak. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah TV merk Sharp ukuran 32 inch warna hitam. Menghukum Anak DS membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Sebagaimana diketahui, dalam sistem peradilan pidana anak lebih mengedepankan dan mengutamakan konsep *diversi* dan *restorative justice*. Keduanya merupakan konsep yang saling berkaitan. *Diversi* merupakan pengalihan proses penanganan perkara anak dari sistem peradilan pidana formal ke mekanisme di luar sistem tersebut, sedangkan *restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian perkara dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan dan perdamaian.

Diversi diterapkan untuk menghindari dampak negatif yang mungkin dialami anak yang berhadapan dengan hukum, seperti stigma dan gangguan perkembangan mental. Melalui *diversi*, anak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih konstruktif, misalnya melalui mediasi atau pemulihan. *Restorative justice*, sebagai tujuan yang ingin dicapai, fokus pada pemulihan kembali keadaan semula antara korban dan pelaku, serta menciptakan rasa damai di antara mereka. Proses *diversi* kerap menjadi salah satu cara untuk mencapai keadilan restoratif. Dengan kata lain, *diversi* adalah mekanisme untuk mencapai tujuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. *Diversi* memungkinkan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tanpa harus melewati proses peradilan yang rumit dan formal. Hakim tidak bisa serta merta memberikan langsung pidana penjara terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak, sebab berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sanksi pidana penjara bagi anak dibawah 18 (delapan belas) tahun merupakan jalan terakhir dalam proses hukum. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah

diuraikan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bentuk pengaturan pidana penjara terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak DS sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta unsur atau delik pidana yang menjadi pertimbangan sehingga perbuatan yang dilakukan anak DS memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan.

Penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh Chairunnisa Cahyaningrum dengan judul karya “Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana”. Mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menentukan apakah anak dapat dijatuhi pidana bersyarat dan regulasi mengatur mengenai penjatuhan pidana bersyarat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.¹² Penelitian hampir serupa juga dilakukan oleh Dewana Putra S. dengan judul karya “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Pokok Sebagaimana Diatur Pada Pasal 362 KUHP (Studi di Pengadilan Negeri Samarinda)”. Mengkaji dasar pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian. Banyaknya kasus tindak pidana pencurian dimana pelakunya adalah anak yang dijatuhkan pidana penjara oleh hakim. Terdapat 3 (tiga) kasus tindak pidana pencurian pokok pasal 362 KUHP yang seluruhnya dijatuhkan sanksi pidana penjara oleh hakim.¹³

¹² Chairunnisa Cahyaningrum, 2024, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 29

¹³ Dewana Putra S, 2018, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Pokok Sebagaimana Diatur Pada Pasal 362 Kuhp (Studi Di Pengadilan Negeri Samarinda)*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm 44

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Andre Rahman dengan judul karya “Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan). Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.¹⁴

Berdasarkan penelitian yang telah ada, penelitian saya berbeda dari penelitian sebelumnya karena saya fokus membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg dalam perspektif perlindungan anak dan pengaturan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum pidana.

Dari uraian yang dikemukakan diatas, telah mendorong penulis untuk membuat penulisan ilmiah yang membahas masalah “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 8/Pid.sus-Anak/2022/PN pdg).

¹⁴ Andre Rahman, 2018, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang)*, Universitas Andalas, Padang, hlm 50

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas dirumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana bentuk pengaturan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg dalam perspektif perlindungan anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Mengkaji bentuk pengaturan pidana penjara kepada anak dalam perspektif hukum pidana.
 - b. Mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun skripsi, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dharma Andalas.
 - b. Menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berpikir ilmiah.
 - c. Memberikan informasi kepada pembaca, khususnya pada pihak yang berhubungan dengan Pengadilan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang bentuk pengaturan pidana penjara kepada anak dalam perspektif hukum pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
 - b. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pidana anak di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak terkait dalam menangani masalah perlindungan anak;
 - 2) Dapat memberikan informasi dan mengetahui penanganan kasus terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang dalam mempelajari menganalisis dan memahami penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah Penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian hukum yang meneliti hukum sebagai sistem norma atau aturan, dengan fokus pada

aspek-aspek internal dari hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan atau studi literatur, dan menganalisis teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁶ Penulis mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian serta bagaimana upaya dalam mengatasi kendala kendala dalam menjatuhkan hukum pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana.

3. Jenis Data

a) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁶ Amirudin dan Zainal Askin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 25.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UU SPPA);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus, ensiklopedia dan sebagainya.¹⁷

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research). Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku atau literatur, jurnal hukum dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 106.

antara lain Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Dharma Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang di sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, Putusan pengadilan dan lain lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif sumber data bisa berupa orang, peristiwa, lokasi, benda, dokumen atau arsip. Beragam sumber tersebut menurut cara tertentu yang sesuai guna mendapatkan data. Pada penelitian kualitatif proses analisisnya dilakukan sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, lalu menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan kemudian mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.¹⁸

¹⁸ Sutopo, H.B. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm 15

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini dan agar lebih terfokus maka penulis merasa perlu merumuskan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Tinjauan Pustaka
- BAB III Bentuk pengaturan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana dalam perspektif hukum pidana
- BAB IV Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pdg dalam perspektif perlindungan anak
- BAB V Penutup